

Pengabdian Berbasis Kebijakan: Strategi Diseminasi *Policy Brief* Pengasuhan Dini

Risnah^{1*}, Muthahharah², Sumarmi³, Harmawati⁴

^{1,2,3}Program Studi Magister Keperawatan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁴Departemen Al-Islam Kemuhammadiyaan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Makassar, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Received: 21-07-2025

Revised: 22-11-2025

Accepted: 14-12-2025

*Corresponding

Author:

Risnah, Program Studi Magister Keperawatan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Email: risnah@uin-alauddin.ac.id

Kata Kunci:

Keluarga;
Pemberdayaan;
Stunting

Keywords:

Family;
Empowerment;
Stunting

Abstrak:

Stunting merupakan merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan di Sulawesi Selatan. Pencegahannya membutuhkan pendekatan lintas sektor. Salah satu elemen penting dalam upaya ini adalah pemberdayaan keluarga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dan mendiseminasikan *policy brief* mengenai pengasuhan anak dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berbasis keluarga, dengan fokus pada pencegahan stunting di Sulawesi Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, BKKBN, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22–23 Juni 2025 di Hotel Swiss Belinn, Sulawesi Selatan. Media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *policy brief*, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan audiensi dengan pemerintah daerah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dapat memperkuat pemahaman serta komitmen terhadap pencegahan stunting berbasis keluarga. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah diseminasi *policy brief* berhasil membuka peluang bagi integrasi kebijakan di tingkat lokal yang mendukung pengasuhan berbasis keluarga dalam pencegahan stunting. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah agar diseminasi dilakukan secara berkala dengan cakupan yang lebih luas dan meningkatkan pemantauan digital berbasis kabupaten/kota untuk evaluasi capaian program secara real-time dan terstruktur.

Abstract:

Stunting is a health problem that is still a challenge in South Sulawesi. Prevention requires a cross-sectoral approach. One of the important elements is family empowerment. This activity aimed to compile and disseminate a policy brief on childcare in the family-based First 1000 Days of Life period, with a focus on stunting prevention in South Sulawesi. The target of this activity was stakeholders, including local governments, BKKBN, health workers, academics, and community. This activity was held on June 22-23, 2025. The media used in this activity were policy briefs, FGD, and hearings with local governments. The findings showed that Pentahelix's collaborative approach involving the government, academia, business world, community, and media could strengthen understanding and commitment to family-based stunting prevention. In conclusion, this activity is that the dissemination of the policy brief has succeeded in opening up opportunities for the integration of policies at the local level that support family-based parenting in stunting prevention. The suggestion for the next activity is that dissemination be carried out periodically with a wider scope and improve district/city-based digital monitoring for real-time and structured evaluation of program achievements.

PENDAHULUAN

Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dari masa kehamilan hingga usia dua tahun, merupakan fase emas yang sangat menentukan tumbuh kembang anak. Pada masa ini, otak berkembang pesat dan membentuk dasar bagi kemampuan kognitif, emosional, motorik, dan sosial. Pengasuhan yang tepat, mencakup gizi, stimulasi, kasih sayang, serta lingkungan yang aman, terbukti berdampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan anak (Black et al., 2023). Sebaliknya, kurangnya perhatian pada pengasuhan di masa HPK dapat meningkatkan risiko stunting, keterlambatan perkembangan, gangguan perilaku, hingga rendahnya produktivitas saat dewasa. *World Bank* juga menegaskan bahwa kegagalan investasi pada periode ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar di masa depan. Karena itu, intervensi di masa HPK harus melibatkan dukungan lintas sektor meliputi sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak untuk memastikan setiap anak mendapatkan awal kehidupan yang optimal demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing (WHO, 2018; Bappenas & BKKBN, 2020; Grantham-McGregor et al., 2017).

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program guna mendukung pengasuhan anak dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup aspek kesehatan, gizi, stimulasi dini, serta pengasuhan yang aman dan responsif. Beberapa program utama meliputi BKB Holistik Integratif (BKB HI), Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT), pendampingan oleh TPK, pemanfaatan LMS BKB EMAS, serta pengembangan ruang pengasuhan seperti TAMASYA. Kebijakan ini mencerminkan komitmen nasional dalam memperkuat kualitas SDM sejak usia dini. Namun, implementasi di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman pelaksana terkait pendekatan holistik integratif, keterbatasan sumber daya dan pendanaan, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor antara pemangku kepentingan pusat dan daerah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

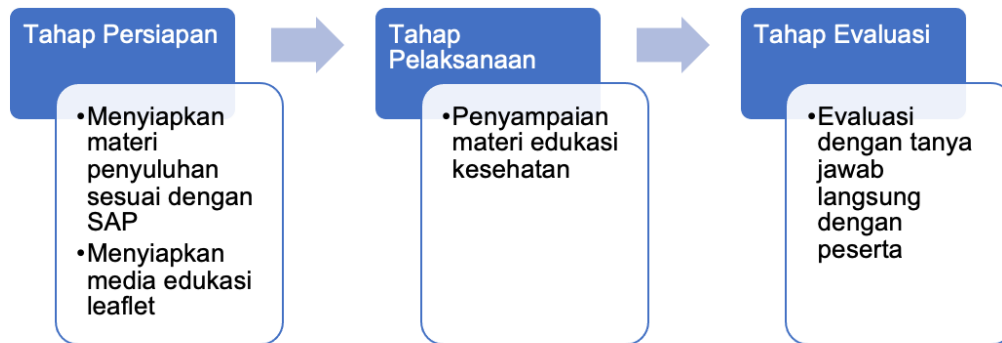
Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), diperlukan pendekatan berbasis bukti yang dapat digunakan sebagai alat advokasi kebijakan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penyusunan policy brief yang komprehensif, berisi gambaran kondisi terkini pengasuhan anak di Indonesia, identifikasi hambatan implementasi, serta rekomendasi strategis yang praktis dan terukur. Rekomendasi ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat dalam merancang intervensi yang lebih terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas & BKKBN, 2020; BKKBN, 2022; UNICEF Indonesia, 2021).

Melalui kegiatan ini, setiap provinsi diharapkan mampu menyusun policy brief yang mencerminkan konteks dan kebutuhan lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan berbasis bukti. Seluruh hasil kajian dari berbagai daerah akan dikompilasi menjadi Bunga Rampai Policy Brief Implementasi Kebijakan Pengasuhan 1000 HPK, yang selanjutnya akan diseminasi secara nasional sebagai bagian dari penguatan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengasuhan anak yang optimal. Dengan tersedianya kebijakan yang responsif dan berbasis data, program pengasuhan 1000 HPK diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta mendukung tercapainya target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan, perkembangan anak, dan kesejahteraan keluarga.

METODE PELAKSANAAN

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melalui penerapan metode yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, advokatif, dan komunikatif dengan harapan pesan kebijakan dapat ditiru secara luas. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja BKKBN Provinsi maupun daerah. Pendekatan partisipatif dengan metode *Focus Group discussion* (FGD) dengan pelibatan

BKKBN daerah, dinas kesehatan, akademisi, dan kader sebagai upaya dalam memperkuat validasi dan dukungan terhadap isi dari *policy brief*, desiminasi kebijakan dengan mempresentasikan *policy brief*, serta audiensi dan advokasi kebijakan di berbagai daerah yang dilaksanakan pada 22-23 Juni 2025 di Hotel Swiss Bell Inn bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Sulawesi selatan dimulai pukul 08.00 Wita-Selesai. Media yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi *policy brief* dan audiensi dengan pemerintah daerah. Tahapan pelaksanaan kegiatan digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini. Selain itu, evaluasi implementasi kebijakan di tingkat lokal juga dilakukan melalui audiensi dengan pemerintah daerah untuk menilai adopsi dan penerapan *policy brief* dalam rencana aksi daerah terkait stunting dan pengasuhan anak.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Diseminasi *Policy Brief*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh berbagai elemen sebanyak 34 orang peserta yang meliputi perwakilan BKKBN, tenaga kesehatan, akademisi, dan kader. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi *policy brief* oleh tim pengabdian masyarakat (Gambar 2). Kegiatan ini menunjukkan bahwa strategi diseminasi *policy brief* dapat memperkuat pemahaman lintas sektor terhadap pentingnya pengasuhan dini dalam masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan serta kesadaran terhadap urgensi pengasuhan berbasis keluarga. Interaksi ini juga menumbuhkan komitmen bersama untuk mendukung kebijakan pengasuhan di tingkat lokal.



Gambar 2. Pemaparan Materi *Policy Brief*

Audiensi dengan pemerintah daerah menjadi sarana penting dalam advokasi kebijakan. Melalui pertemuan ini, *policy brief* yang disusun oleh tim pengabdian berhasil membuka peluang untuk diintegrasikan ke dalam rencana aksi daerah terkait stunting dan pengasuhan anak. Hal ini

menunjukkan bahwa dokumen kebijakan yang ringkas dan berbasis bukti memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perencanaan program pembangunan keluarga secara konkret.

Strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda dan calon orang tua. Hasil dari kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dapat memperkuat advokasi kebijakan secara kolaboratif dan berkelanjutan di tingkat komunitas sebagaimana hasil evaluasi kegiatan pada peserta (Gambar 3).



Gambar 3. Peserta, Panitia, dan Narasumber Kegiatan Diseminasi *Policy Brief*

Pengabdian kepada masyarakat berbasis kebijakan merupakan pendekatan strategis dalam mengintegrasikan hasil riset akademik ke dalam proses formulasi dan advokasi kebijakan publik. Dalam konteks pengasuhan anak usia dini, pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan periode kritis dalam pembentukan kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan fisik (Shonkoff & Phillips, 2000; Britto et al., 2017).

Di Indonesia, isu pengasuhan anak usia dini telah menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, terutama terkait dengan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (Bappenas, 2020; BKKBN, 2021). Namun, masih terdapat kesenjangan antara hasil-hasil riset ilmiah dengan praktik pengasuhan yang dilakukan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan dan masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) (UNICEF, 2017; UNESCO, 2022).

Dalam upaya menjembatani kesenjangan ini, pengabdian masyarakat berbasis kebijakan dilakukan melalui penyusunan dan diseminasi *policy brief* yang berisi rekomendasi praktis dan berbasis bukti terkait pengasuhan anak usia dini. *Policy brief* adalah dokumen singkat yang dirancang untuk menyampaikan isu kebijakan secara ringkas dan jelas kepada pengambil kebijakan (Young & Quinn, 2002; Cairney, 2016). Dokumen ini menjadi alat penting untuk mendorong adopsi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di tingkat lokal maupun nasional.

Pengasuhan yang optimal mencakup beberapa aspek, antara lain pengasuhan responsif, pemenuhan gizi dan kesehatan, pembelajaran dini, perlindungan terhadap kekerasan, serta dukungan terhadap orang tua (Black et al., 2017; WHO, 2018). Sayangnya, masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya kelima aspek tersebut, sehingga diperlukan strategi advokasi yang dapat menjangkau pengambil kebijakan dan masyarakat luas secara efektif (Hasyim, 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para peserta telah mengetahui keberadaan *policy brief* sebagai media strategis dalam menyampaikan informasi kebijakan pengasuhan dan pencegahan stunting. Kegiatan ini telah berhasil mengedukasi pemangku

kepentingan tentang pentingnya pencegahan stunting berbasis keluarga dalam kerangka pendekatan Pentahelix. Diseminasi *policy brief* ini mendorong penguatan peran keluarga sebagai agen utama dalam pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan efektivitas kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata dalam mencegah stunting secara berkelanjutan.

Kegiatan edukasi dan diseminasi *policy brief* seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan cakupan wilayah yang lebih luas, terutama di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengadopsi isi *policy brief* sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan lokal yang berbasis keluarga dan mendukung konvergensi lintas sektor. Selain itu, diperlukan pengembangan media monitoring digital berbasis kabupaten/kota untuk memudahkan evaluasi capaian program secara real-time, terstruktur, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). *Pedoman Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)*. Jakarta: BKKBN.
- Black, R. E., et al. (2023) – "Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries." *Lancet*, 382(9890), 427-451.
- Britto, P. R., Lye, S. J., Proulx, K., Yousafzai, A. K., Matthews, S. G., Vaivada, T., ... & Bhutta, Z. A. (2017). Nurturing care: promoting early childhood development. *The Lancet*, 389(10064), 91–102.
- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BKKBN. (2021). *Pedoman Ketahanan Keluarga Tahun 2021*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., ... & Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*, 389(10064), 77–90.
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Springer.
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y.B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L. & Strupp, B. (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*, 369(9555), pp.60–70.
- Hasyim, N. (2021). Peran keluarga dalam pencegahan stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 13(1), 45–52.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). *Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2021-2024*.
- Kementerian PPN/Bappenas & BKKBN. (2020). *Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia dalam Konteks 1000 HPK*. Jakarta: Bappenas.
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (2000). *From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development*. Washington, DC: National Academies Press.
- UNESCO. (2022). *Early Childhood Education and Care Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Early Moments Matter for Every Child: Strengthening Holistic Parenting and Early Childhood Development in Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- UNICEF. (2017). *Early Moments Matter for Every Child*. New York: UNICEF.
- World Health Organization. (2018). *Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential*. Geneva: WHO.
- Young, E., & Quinn, L. (2002). *Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe*. Budapest: Open Society Institute.